

IMPLIKASI *ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN (ATSP) 2016-2025* DALAM PENGEMBANGAN *PROJECT TEN NEW BALI'S* INDONESIA

Dini Septyana Rahayu

dinirahayu@unida.gontor.ac.id
Universitas Darussalam Gontor

Dewi Sulistyawati

Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki potensi pariwisata terbesar di Asia Tenggara, memerlukan satu strategi khusus dalam rangka meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di lingkup internasional. Sementara itu, ASEAN dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata di kawasan Asia Tenggara telah menyepakati satu kerangka kebijakan ATSP (ASEAN Tourism Strategic Plan) selama dua periode, I dan II. Kebijakan tersebut berimplikasi pada pengambilan kebijakan terkait pariwisata di negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implikasi ATSP (ASEAN Tourism Strategic Plan) II tahun 2016-2025 terhadap kebijakan pariwisata Indonesia. ATSP II tahun 2016-2025 merupakan satu bentuk rezim pariwisata di Asia Tenggara yang mempengaruhi perumusan

strategi pariwisata Indonesia Project Ten New Bali. Pengembangan Project Ten New Bali meliputi Danau Toba Sumatra Utara, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Pantai Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Candi Borobudur Jawa Tengah, Gunung Bromo Jawa Timur, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Wakatobi Sulawesi Selatan dan Pulau Morotai Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan konsep rezim internasional dan sustainable tourism, untuk menjelaskan keterkaitan strategi pariwisata Project Ten New Bali Indonesia sebagai implikasi pengaruh rezim pariwisata di kawasan Asia Tenggara yang mendorong Indonesia merumuskan strategi pariwisata baru untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Data dokumentasi diambil dari sejumlah dokumen resmi yakni ASEAN, Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, dan wawancara.

Keywords: *ATSP II, Project Ten New Bali's, Sustainable Tourism*

Abstract

Indonesia as one of the ASEAN member countries that has the largest tourism potential in Southeast Asia, requires a special strategy in order to increase Indonesia's competitiveness in the international sphere. Meanwhile, ASEAN in order to increase tourism potential in the Southeast Asian region has agreed on an ATSP (ASEAN Tourism Strategic Plan) policy framework for two periods, I and II. This policy has implications for policy-making related to tourism in ASEAN member countries, including Indonesia. This study aims to discuss the ATSP

(ASEAN Tourism Strategic Plan) II 2016-2025 on Indonesia's tourism policy. ATSP II 2016-2025 is a form of tourism regime in Southeast Asia that influences the formulation of Indonesia's tourism strategy, the Ten New Bali Project. The development of the Ten New Bali Project includes Lake Toba North Sumatra, Tanjung Lesung Banten, the Thousand Islands Jakarta, Tanjung Kelayang Beach Bangka Belitung, Borobudur Temple in Central Java, Mount Bromo in East Java, Mandalika West Nusa Tenggara, Labuan Bajo East Nusa Tenggara, Wakatobi South Sulawesi and Morotai Island, North Maluku. This study uses the concept of an international regime and sustainable tourism, to explain the linkage of tourism and tourism strategies in the Southeast Asian region which encourages Indonesia to formulate strategies to increase national competitiveness. This study uses a qualitative method with data collection techniques documentation and interviews. Data documentation is taken from a number of official documents, namely ASEAN, the Ministry of Tourism & Creative Economy of the Republic of Indonesia, scientific journals, scientific articles, newspapers, and interviews.

Keywords: *ATSP II, Ten New Bali Projects, Sustainable Tourism*

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia bentuk respon terhadap perubahan rezim pariwisata Asia Tenggara pasca *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025*. Rezim pariwisata Asia Tenggara diasumsikan mengalami perubahan pasca disepakatinya *ATSP*, yang terdiri dari dua periode yakni *ATSP I* dan *ATSP II*, merupakan bagian dari rezim internasional dan Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara dan ASEAN ikut melakukan perubahan terkait kebijakan

pariwisata. Indonesia mengembangkan *Project Ten New Bali* sebagai salah satu strategi kebijakan pariwisata baru memasukkan wilayah-wilayah baru di Nusantara sebagai tujuan wisata utama selain Bali, meliputi Danau Toba Sumatra Utara, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Pantai Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Candi Borobudur Jawa Tengah, Gunung Bromo Jawa Timur, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Wakatobi Sulawesi Selatan dan Pulau Morotai Maluku Utara (CNN, 2018). Tempat-tempat tersebut merupakan tujuan wisata yang sudah lama ada dan dikelola di Indonesia, namun lebih dikembangkan mengikuti arahan kesepakatan *ATSP II (2016-2025)* yang menerapkan konsep *Sustainable Tourism*.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting bagi peningkatan perekonomian nasional, melalui penciptaan ribuan lapangan pekerjaan, mengembangkan infrastruktur suatu negara dan menanamkan rasa pertukaran budaya antara wisatawan mancanegara dan domestik. Keuntungan terbesar pariwisata adalah masuknya devisa kedalam perekonomian suatu negara, terutama bagi negara-negara berkembang. Sebagaimana yang tertulis dalam Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) bahwa sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki aset kepariwisataan sehingga menjadikan sektor ini sebagai pilar ekonomi negara (Kemenparekraf, 2018). Perekonomian nasional tidak bisa bergantung pada sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa negara, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan mengalami krisis. Maka pariwisata

dapat membantu meringankan kondisi industri yang lemah dan menghentikannya agar tidak berdampak besar pada ekonomi negara. Sektor pariwisata merupakan jaring pengaman bagi negara-negara dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi negara-negara berkembang (Katja, 2020).

Dalam studi Hubungan Internasional, pariwisata dipelajari tidak hanya sebagai salah satu instrumen peningkatan ekonomi negara, namun juga sebagai salah satu instrumen diplomasi dan *nation branding* negara dalam konstelasi global. Suatu negara dapat menggunakan pariwisata sebagai sarana untuk meningkatkan devisa negara, menjalin perdamaian dunia, menawarkan pekerjaan bahkan dapat digunakan sebagai ajang untuk mempromosikan potensi sumber daya alamnya ke dunia internasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi untuk mengatur dan mengelola sektor pariwisata yang melibatkan berbagai aktor negara hingga mampu berdaya saing dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional dan citra baik di mata internasional. Kebijakan pariwisata adalah elemen pengambilan keputusan yang bersifat politik. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pariwisata menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Aspek politik dilihat dari bagaimana kekuasaan digunakan oleh organisasi publik dalam mengelola pariwisata. Instrumen utama yang digunakan Pemerintah melibatkan semua jenis organisasi masyarakat dan pemerintah daerah. Akan tetapi, peran Pemerintah sangat penting karena pariwisata merupakan sektor yang membawa banyak manfaat baik dari segi ekonomi maupun politik bagi negara (Octarica, 2015).

Salah satu tujuan pariwisata internasional utama di Indonesia adalah Bali, yang dinobatkan sebagai *The Best Destination in The World* oleh TripAdvisor 2017 (Sugiarto, 2019). Wisatawan mancanegara

yang datang ke Indonesia selalu datang melalui gerbang pulau Dewata, Bali. Bagi masyarakat internasional, khususnya wisatawan asing, Bali merupakan satu-satunya tempat wisata atau tujuan yang mereka kenal ketika mereka akan ke Indonesia. Di sisi lain, hal tersebut menyiratkan bahwaberarti wisatawan mancanegara kurang mengetahui aneka ragam destinasi wisata yang unggul di Indonesia selain Bali. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kemenpar yang mengusung ikon Bali sebagai sebutan 10 destinasi prioritas dengan tujuan 10 Bali Baru yang dapat mendongkrak sektor ekonomi nasional dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (Ruslan, 2016). Adapun 10 destinasi unggulan pariwisata tersebut yakni Borobudur di Jawa Tengah, Toba di Sumatra Utara, Tanjung Kelayang di Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Pulau Seribu di Jakarta, Gunung Bromo di Jawa Timur, Mandalika di Lombok, Labuan Bajo di pulau Komodo, Wakatobi di Sulawesi Utara dan Marotai di Maluku Utara (Thaib, 2019). Destinasi-destinasi wisata baru tersebut telah dibuat sesuai karakter, kombinasi alam, budaya dan keistimewaan tersendiri. Perbedaan tersebut telah membuat Indonesia kaya akan daya tarik, budaya, dan tradisi di setiap daerahnya.

Peningkatan strategi pada sektor pariwisata merupakan bagian terpenting dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, sehingga diperlukan kerjasama negara anggota ASEAN. ATSP merupakan cabang dari kerjasama ekonomi antarnegara ASEAN yang termasuk dalam *ASEAN Economic Community* (AEC) sebagai salah satu pilar utama ASEAN selain *ASEAN Political-Security Community* (APSC) dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC) (Kemenlu, Pembentukan Masyarakat ASEAN 2015, 2015). Sebagai

negara kepulauan terbesar didunia dengan panjang garis pantai lebih dari 95.181 km, 13.446 pulau, luas laut sekitar 3,1 juta km², Indonesia memiliki 1128 suku bangsa, dan memiliki 746 bahasa dan dialek serta dengan sejumlah karya dan peninggalan budaya yang diakui dunia sebagai *world cultural heritage sites* (8 warisan budaya) (Kemenparekraf, Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, 2015). Dengan potensi besar ini, Indonesia memerlukan strategi kebijakan untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional terutama di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) II merupakan salah satu bentuk rezim pariwisata internasional, yang terbentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara Asia Tenggara dan anggota ASEAN dalam kerangka kerjasama *ASEAN Economic Community (AEC)* sebagai *platform* untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Menurut Haggard Stephan and Beth A. Simmons menyatakan bahwa rezim dapat menjadi sumber kelemahan atau kekuatan bagi suatu negara, sebab rezim dapat mengubah negosiasi dan perilaku implementasi pada suatu pemerintahan (Stephan Haggard and Beth A. Simmon, 1987). Melalui *ATSP II* Indonesia mengembangkan satu kebijakan pariwisata baru yang sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam *ATSP II*, hal ini diasumsikan sebagai sebuah perubahan perilaku Indonesia pasca diberlakukannya rezim pariwisata berkelanjutan baru di ASEAN.

Bagi ASEAN, *ATSP* merupakan wujud kesepakatan strategis untuk mengintegrasikan dan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan di wilayah Asia Tenggara. Fokus *ATSP II* ini yaitu meningkatkan daya saing pariwisata ASEAN dengan mengintegrasikan destinasi-destinasi wisata, dan memastikan

bahwa unsur pariwisata ASEAN sesuai dengan aspek inklusif dan berkelanjutan (Ayuningtyas, 2016). Hal ini di implementasi Indonesia dalam bentuk pengembangan sepuluh destinasi wisata baru selain Bali, disebut dengan *10 New Balis* yang juga akan menjadi prioritas di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini relevan untuk dibahas dalam konteks studi Hubungan Internasional, sebab industri pariwisata merupakan bagian penting dalam penciptaan citra baik suatu negara di sistem internasional, sekaligus memiliki peluang yang sangat besar bagi pendapatan nasional sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang alasan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan pariwisata baru, yakni “Mengapa Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam *Project Ten New Balis?*”

Kerangka Pemikiran

Rezim Internasional didefinisikan oleh John Ruggie sebagai seperangkat harapan, aturan, rencana, energi organisasi serta komitmen bersama yang telah diterima oleh sekelompok negara. Selain itu, rezim internasional juga dijelaskan sebagai sebuah institusiosial yang terdiri atas prinsip, norma, aturan, prosedur dan program yang disepakati serta mengatur interaksi aktor-aktor. Namun demikian, rezim internasional berbeda dengan organisasi internasional (Ruggie, 1982). Ruggie juga menyatakan bahwa rezim internasional bisa dikatakan sebagai serangkaian perilaku

internasional yang telah terinstitusi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa negara pasti akan melakukan kerjasama dan membuat aturan maupun kesepakatan untuk kemudian menciptakan rezim internasional (Hanneda, 2015). Meski berbeda, namun organisasi internasional juga dapat membentuk sebuah kesepakatan yang kemudian menjadi sebuah rezim internasional. Sebagaimana ASEAN sebagai organisasi internasional yang kesepakatan dalam bingkai kerjasama untuk meningkatkan pariwisata dalam *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) II*.

Rezim merupakan sebuah pengaturan yang berdiri sendiri dan mengasumsikan bahwa para aktor akan mengevaluasinya hanya berdasarkan kemampuannya masing-masing. Selain itu, rezim juga dapat menjadi sumber kekuatan atau kelemahan. Suatu rezim dapat mempengaruhi negosiasi dan perilaku implementasi pada sebuah pemerintahan. Rezim yang efektif seiring waktu akan mengubah struktur masalah atau meningkatkan kapasitas pemecahan masalah dari sistem tersebut, sehingga rezim internasional sengaja dibuat sebagai sarana kerjasama internasional dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Perilaku negara berupa kompromi, kepatuhan, dan model penyelesaian masalah akan terbentuk seiring berlakunya sebuah rezim internasional (Stephan Haggard and Beth A. Simmon, 1987).

Meski dapat diartikan sebagai elemen baru dalam tatanan internasional, akan tetapi rezim sebenarnya juga merupakan pengaturan yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi (kepentingan nasional), dan nantinya juga akan mempengaruhi kepentingan nasional negara (Keohane, 1984). Dalam tulisan ini, keberadaan *ATSP II* tahun 2016-2025 merupakan sebuah rezim internasional

yang sebetulnya dimotivasi oleh kepentingan negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk mengimbangi perubahan dalam sistem pariwisata internasional. Untuk meningkatkan daya saing pariwisata di negaranya masing-masing, sekaligus tetap menjaga tatanan regional Asia Tenggara, ASEAN merumuskan *ATSP* sebagai kesepakatan sekaligus pengaturan baru sektor pariwisata untuk negara kawasan Asia Tenggara. Adanya *ATSP II* kemudian mempengaruhi Indonesia, salah satunya, dalam merumuskan kebijakan di sektor pariwisata sekaligus menandai perubahan perilaku Indonesia dalam sektor tersebut, sebagai bentuk kepatuhan dan untuk menjaga kepentingan negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melalui kebijakan *Project Ten New Bali's* berupaya untuk mencapai kepentingan mereka di sektor pariwisata, sehingga mampu meningkatkan daya saing pariwisata di Asia Tenggara bahkan internasional.

Perubahan perilaku negara-negara terkait sektor pariwisata, salah satunya dipicu oleh adanya perubahan rezim pariwisata internasional yang lebih memperhatikan pembangunan berkelanjutan, *sustainable tourism*. UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya tentang dampak saat ini dan masa datang dari 3 aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, menangani kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat (UNWTO, 2017). UNWTO dan UNEP (*United Nations Environment Programme*) mengidentifikasi 12 tujuan untuk pariwisata berkelanjutan:

1. Kelangsungan hidup ekonomi: untuk memastikan kelangsungan hidup dan daya saing destinasi pariwisata dan

perusahaan, sehingga mereka dapat terus berkembang dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

2. Kemakmuran lokal: untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata bagi kemakmuran warga setempat, termasuk proporsi pengeluaran pengunjung yang dipertahankan secara lokal.
3. Kualitas ketenagakerjaan: untuk memperkuat jumlah dan kualitas pekerjaan lokal yang diciptakan dan didukung oleh pariwisata, termasuk tingkat gaji, kondisi layanan dan ketersediaan untuk semua tanpa diskriminasi oleh jenis kelamin, ras, kecacatan atau dengan cara lain.
4. Kesenjangan sosial: untuk mencari manfaat ekonomi dan sosial dari pariwisata diseluruh komunitas penerima, termasuk meningkatkan peluang, pendapatan dan layanan yang tersedia untuk orang miskin.
5. Pemenuhan pengunjung: untuk memberikan pengalaman yang aman, memuaskan bagi pengunjung, tersedia untuk semua tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, kecacatan atau dengan cara lain.
6. Pengendalian lokal: untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan dan pengembangan masa depan pariwisata di daerah mereka, dengan berkonsultasi kepada pemangku kepentingan lainnya.
7. Kesejahteraan masyarakat: menjaga dan memperkuat kualitas hidup masyarakat setempat, termasuk struktur sosial dan akses ke sumber daya, fasilitas dan sistem pendukung kehidupan, menghindari segala bentuk degradasi atau eksploitasi sosial.

8. Kekayaan budaya: untuk menghormati dan meningkatkan warisan bersejarah, budaya otentik, tradisi dan kekhasan komunitas warga setempat.
9. Integritas fisik: untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lanskap, baik perkotaan maupun pedesaan, dan menghindari kerusakan fisik dan visual lingkungan.
10. Keanekaragaman hayati: untuk mendukung pelestarian kawasan alam, habitat dan satwa liar, dan meminimalkan kerusakan.
11. Efisiensi sumber daya: untuk meminimalkan penggunaan sumber daya yang langka dan tidak terbarukan di pengembangan dan pengoperasian fasilitas dan layanan pariwisata.
12. Kemurnian lingkungan: untuk meminimalkan polusi udara, air dan tanah serta pembangkitan limbah oleh perusahaan pariwisata dan pengunjung.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholder), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewedahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi. Menurut Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arinda, aspek pertama dan utama, yaitu keberlanjutan lingkungan dalam melakukan pembangunan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan, karena keberlanjutan lingkungan dapat menjamin ekosistem bumi agar tidak terancam dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Aspek kedua yakni keberlanjutan ekonomi, agar menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan dan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar destinasi pariwisata, serta meningkatkan pemerataan distribusi

kemakmuran. Aspek terakhir adalah keberlanjutan sosial budaya, yang didefinisikan sebagai terwujudnya keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup untuk seluruh manusia (Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, 2017).

Aspek ini juga memiliki empat sasaran tersendiri, yakni memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan mengentaskan kemiskinan masyarakat, karena pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai bila terdapat kesenjangan pada kelas-kelas sosial di masyarakat. Selain itu, pariwisata yang berkelanjutan juga harus mempertahankan keanekaragaman budaya daerah dengan tetap menggunakan pengetahuan tradisional dan modern, serta mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan (Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, 2017). Pada tulisan ini, agenda pariwisata berkelanjutan mempengaruhi arah pariwisata dalam konteks global, salah satunya adalah terwujudnya kesepakatan *ATSP II* untuk periode 2016-2025 yang mengedepankan aspek pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Argumentasi Penelitian

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pengembangan pariwisata pada *Project Ten New Bali's* karena adanya perubahan rezim pariwisata internasional berbasis *Sustainable Tourism* dan juga diadaptasi oleh negara anggota ASEAN, dalam bentuk *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025*. *ATSP II 2016-2025* merupakan rezim pariwisata internasional khususnya di Asia Tenggara berupa arahan strategi pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pariwisata di negara-negara ASEAN, salah satunya Indonesia. Dalam menyikapi rezim pariwisata di

kawasan ASEAN tersebut, Indonesia mengambil kebijakan dengan melakukan pembangunan *project ten new Bali's* yang menerapkan konsep *Sustainable Tourism*. Adapun *project ten new Bali's* yaitu Danau Toba di Sumatra Utara, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Pantai Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Gunung Bromo di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Wakatobi Sulawesi Selatan dan Pulau Morotai Maluku Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan alasan Indonesia menerapkan *Project Ten New Bali's*, sebagai bagian dari adanya perubahan rezim pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, penelitian kualitatif menyajikan gambaran tentang suatu SITUASI sosial dan menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, dan dalam metodenya tidak menggunakan data numerik sebagai alat analisa melainkan kata-kata (Michael Quinn Patton and Michael Cochran, 2002)

Batasan Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi pada alasan Indonesia merumuskan kebijakan *Project Ten New Bali's* di Indonesia sebagai upaya peningkatan sektor pariwisata Indonesia menyikapi perubahan rezim pariwisata regional dalam *ATSP II* di ASEAN.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi sejumlah dokumen

resmi dari ASEAN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, jurnal ilmiah, serta artikel dari laman resmi, serta surat kabar. Wawancara dilakukan dengan Analisis Kebijakan Madya di Kemenparekraf untuk memperoleh data primer tentang pariwisata Indonesia dan *Project Ten New Bali's*.

Teknik Analisa Data

Data dianalisis dengan proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pertama, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan transformasi data kasar dari lapangan. Dari proses ini peneliti mencari data valid dari jurnal atau skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Kedua, penyajian data yakni sekumpulan data tersusun yang memberikan kemungkinan untuk disimpulkan dari pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya dengan penyajian data peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut. Ketiga, penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa dan memproses data berdasarkan konsep *sustainable tourism* dan konsep rezim internasional kemudian akan diambil kesimpulannya.

Pembahasan

Pariwisata Asia Tenggara dan Indonesia

Negara-negara kawasan Asia Tenggara berupaya meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata guna mewujudkan kawasan Asia Tenggara sebagai tujuan wisata terbaik dan berkualitas di kancah internasional. Untuk ASEAN sendiri, sektor pariwisata termasuk

ke dalam dua belas sektor prioritas liberalisasi yang ditargetkan untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Sektor pariwisata merupakan satu dari lima sektor jasa yang termasuk dalam prioritas liberalisasi, sebab sektor ini adalah satu-satunya sektor yang bebas hambatan tarif maupun non tarif, sekaligus dapat berperan besar dalam meningkatkan regionalisasi di kawasan Asia Tenggara.

Pemanfaatan keanekaragaman budaya maupun kekayaan alam di Asia Tenggara memang dapat memberikan dukungan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota. Hal ini sesuai dengan salah satu ayat Al-Qur'an yang berisi tentang anjuran untuk mencari keuntungan dari apa yang telah ia ciptakan yang berupa sumber daya alamnya, meliputi keindahan alam lautan, ikan-ikan yang ada di lautan dan pegunungan agar dapat dijadikan sumber peningkatan ekonomi sebuah negara. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Ma'idah: 96)

Jumlah kunjungan wisatawan ke negara-negara ASEAN mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang menyumbang devisa negara ASEAN dan dapat membantu perekonomian negara di tengah tantangan

ekonomi global. Sektor pariwisata tidak hanya dikembangkan di pasar Asia Tenggara tetapi juga menarik minat pasar raksasa ekonomi di Eropa dan Amerika serta negara berkembang (Tourism, Where to Invest). Pada tahun 2018, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke negara-negara kawasan Asia Tenggara mencapai 136,2 juta kunjungan. Dari pencapaian tersebut membuktikan terjadinya peningkatan kunjungan wisman 8,34% dari tahun sebelumnya. Sektor pariwisata memberikan solusi kepada negara-negara ASEAN ketika ditengah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok (Kusnandar, 2019). Peningkatan infrastruktur di daerah destinasi wisata merupakan salah satu faktor yang dapat memacu laju perkembangan kunjungan wisatawan. Hal ini penting, karena jika sektor pariwisata tidak dapat mendatangkan para wisatawan lokal dan mancanegara, maka sektor pariwisata tidak dapat menjadi jalur alternatif bagi devisa negara. Oleh diperlukan promosi untuk mengenalkan daerah destinasi wisata di kawasan Asia Tenggara.

Berikut adalah beberapa destinasi wisata andalan Asia Tenggara:

Tabel 1. Destinasi Pariwisata di Asia Tenggara

No	Destinasi Wisata	Negara
1	Ancol Dreamland, Banyuwangi, Komodo National Park, Bunaken Marine Park, Wae Rebo Village, Raja Ampat Island	Indonesia
2	Barocay Island, Banaue Rice Terraces, The Municipality of Dansol, Chocolate Hills	Philipina
3	Mount Kinabalu, Genting Highlands, Batu Caves, Langkawi the Jewel of Kedah, Sipadan Island, Petronas Twin Towers	Malaysia

No	Destinasi Wisata	Negara
4	Marina Bay Sands, Universal Studio Singapore, Garden by The Bay, Orchard Road, Jurong Bird Park, Sentosa Island	Singapura
5	The Grand Palace, Phi Phi Island, Erawan National Park, Bangkok National Museum, Chiang Mai Night Bazaar, Khao Sok National Park	Thailand
6	Halong Bay, Thien Mu Pagoda, Hoan Kiem Lake, Phu Quoc, Phong Nha-Ke Bang National Park, The Sand Dunes of Mui Ne	Vietnam
7	Omar Ali Saifuddien Mosque, Ulu Temburong National Park, Brunei Agro Tehcnology Park, Royal Regalia Museum	Brunei
8	Vientiane Great Stupa, Patuxai Victory Monument, Vang Vieng, Phionsavan	Laos
9	Yangon, Bagan, Chin Hill, Nay Pyi Taw	Myanmar
10	Angkor Wat, Kratie, Sihanoukville, The Great Lake Tonle Sap	Cambodia

Sumber: *ASEAN Travel Infographics*

Sementara itu di Indonesia, kondisi Pembangunan pariwisata di Indonesia lebih mengutamakan pembangunan kepariwisataan di kawasan Jawa-Bali yang menyebabkan sedikitnya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia selain Bali. Hal ini disebabkan karena terjadinya pembangunan pariwisata yang tidak merata karena hanya bertumpu pada satu pintu gerbang pariwisata utama yaitu Bali. Pulau Bali telah menjadi ikon wisata Indonesia yang terkenal di dunia internasional dengan potensi wisata yang menjadi daya tarik berupa budaya dan tradisi, panorama alam, kelestarian dan keanekaragaman flora dan fauna, dan peninggalan sejarah yang asri membuat Pulau Bali selalu memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara (I Nengah

Wijaya and I Nyoman Kanca, 2019). Selain itu, terdapat pula empat faktor yang meningkatkan daya tarik Bali, meliputi faktor harga, daya tarik budaya, daya tarik pantai, dan kenyamanan (Suradnya, 2006). Wisatawan mancanegara mengunjungi Bali, bukan hanya karena daya tarik yang ditawarkan, namun juga karena popularitas Bali sebagai destinasi jika mereka ke Indonesia memang melebihi popularitas tempat-tempat lain di Indonesia. Hal ini lah yang kemudian menjadi prioritas bagi Indonesia, bahwa memperkenalkan destinasi wisata selain Bali diasumsikan mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kancah internasional.

***Sustainable Tourism* Dalam Sektor Pariwisata ASEAN**

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung pelaku kegiatan kebudayaan dan pariwisata agar dapat berkembang dan merata secara optimal sehingga pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif keunggulan bersaing negara Indonesia. Adanya keunggulan bersaing dalam sektor pariwisata akan mempercepat pemulihan ekonomi negara dan memulihkan citra Indonesia di dunia internasional sesuai dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional (Dwi Indah Lestari and Patria Prasetio Adi, 2015).

Sustainable tourism merupakan pariwisata yang dalam pelaksanaannya memperhatikan tiga aspek penting untuk menjamin keberlangsungan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk saat ini dan di masa depan dan memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan komunitas (UNWTO, 2017). Acuan pelaksanaan pariwisata yang berkelanjutan menurut UNWTO adalah dengan:

- a. Memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pembangunan pariwisata, serta memelihara proses ekologi yang penting dan membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati.
- b. Menghormati sosial budaya masyarakat pribumi dan melestarikan budaya binaan dan menjaga budaya warisan beserta nilai-nilai tradisional, serta toleransi antar budaya
- c. Memastikan operasi ekonomi yang layak dan berjangka panjang, memberikan manfaat sosio-ekonomi bagi semua pemangku kepentingan termasuk lapangan pekerjaan yang stabil dan peluang memperoleh pendapatan dan memberikan layanan sosial kepada masyarakat dan ikut berkontribusi pada pengentasan kemiskinan (UNWTO, 2017).

ASEAN melihat pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu bagian dari program pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sektor pariwisata merupakan sektor yang penting bagi devisa negara-negara anggota, sekaligus sektor yang bebas hambatan sebagaimana dalam kerangka kerjasama ekonomi dan perdagangan lain. Oleh karenanya, untuk mencapai peningkatan pendapatan negara-negara melalui wisata, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan aktivitas ekonomi yang dapat dilanjutkan, ASEAN mengadopsi *sustainable tourism* ke dalam kesepakatan strategis di sektor wisata, *ATSP (ASEAN Tourism Strategic Plan)*.

Pada dasarnya, ASEAN memang telah memiliki konsentrasi khusus dalam mewujudkan masyarakat Asia Tenggara yang terintegrasi baik secara ekonomi politik maupun sosio-kultural. Salah satunya melalui sektor pariwisata, ASEAN merealisasikan *ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015* sebagai upaya

mewujudkan ekonomi ASEAN yang inklusif, hijau, dan berbasis ilmu pengetahuan (ASEAN, 2015). *ATSP* dibentuk sebagai sebuah rencana besar dan strategis ASEAN dalam proses integrasi ekonomi, sekaligus peningkatan ekonomi negara anggota melalui sektor wisata. Melalui rencana tersebut, ASEAN mengkonsolidasikan pendekatan-pendekatan yang strategis untuk mengatasi masalah seperti pemasaran atau promosi wisata, pengembangan standar kualitas sumber daya manusia, pemerataan konektivitas, investasi, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memperhatikan aspek lain seperti keselamatan, keamanan, dan kelestarian warisan alam dan budaya (ASEAN, 2015).

Dalam *ATSP II* periode 2016-2025 ini, ASEAN bervisi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan Negara anggota dalam pengelolaan pariwisata. Salah satunya adalah dalam aspek pemerataan persebaran arus pariwisata di negara masing-masing. Sama halnya yang terjadi dengan Indonesia, yang pengelolaan pariwisatanya tidak merata. Fokus pariwisata ASEAN, melalui *ATSP II* diarahkan untuk meningkatkan daya saing melalui pengaturan pemasaran, pengembangan produk-produk wisata, menarik investasi, menciptakan pariwisata berkualitas yang berbasis kekayaan sumber daya alam dan dikombinasikan dengan koordinasi sumber daya manusia yang baik, konektivitas, dan fasilitasi perjalanan wisata dengan infrastruktur yang memadai (ASEAN, 2015). Aspek-aspek tersebut sesuai dengan penjabaran UNWTO tentang 12 capaian yang diharapkan dari sebuah pariwisata yang berkelanjutan (UNWTO, 2017).

Agenda-agenda strategis ASEAN dalam mengembangkan pariwisata di kawasan Asia Tenggara dalam *ATSP II* 2016-2025

telah disepakati oleh negara-negara anggota. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh konsep rezim internasional, telah memenuhi syarat untuk sebuah kesepakatan menjadi satu aturan, standar, atau rezim baru dalam tatanan internasional (Hanneda, 2015). Dengan demikian, *ATSP II* merupakan sebuah rezim internasional baru di bidang pariwisata yang berlaku di Asia Tenggara, terutama untuk negara anggota ASEAN, aturan dan prosedur-prosedur yang tertera dalam *ATSP II* akan mempengaruhi implementasi kebijakan negara-negara anggota, salah satunya Indonesia.

Project Ten New Balis Indonesia sebagai Respon terhadap ATSP II

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata berupaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Salah satunya adalah melalui perumusan kebijakan pengembangan sepuluh Destinasi Prioritas atau sepuluh Bali Baru yang juga menerapkan konsep *sustainable tourism*, sehingga berkelanjutan dan inklusif. Sepuluh Bali Baru merupakan makna kiasan untuk memberikan pemahaman kepada publik luas tentang kekayaan alam dan budaya yang dimiliki setiap daerah wisata tersebut. Indonesia memang memiliki industri pariwisata yang besar, namun sayangnya, mayoritas masyarakat internasional mengenal Indonesia sebagai Bali karena memang popularitas Bali di mata wisatawan asing melebihi wilayah lain (Kemenlu, 2018).

Penetapan 10 destinasi pariwisata prioritas “Bali Baru” merupakan perwujudan dari amanat Presiden melalui Surat Sekretariat/Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015, perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Awal tahun pada tanggal 4 Januari 2016 (Komelia Johanna, 2020). Proyek ini dikembangkan dengan melibatkan peran serta dari Menko Marves (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) dengan Kementerian terkait yaitu Kemenparekraf, Kementerian PUPR, Kemendagri, Kominfo, Kemendes, Kementerian BUMN, dsb (Axioma, 2021).

Sepuluh destinasi wisata baru tersebut dirancang untuk memperbaiki sektor pariwisata nasional sehingga dapat menjadi andalan sektor ekonomi nasional. Proyek ini dilaksanakan untuk menjadikan wisata Indonesia sebagai wisata kelas dunia baik pariwisatanya maupun pembangunan infrastruktur. Adapun sepuluh destinasi wisata prioritas tersebut yakni Danau Toba di Sumatra Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara (Komelia Johanna, 2020). Pengembangan wisata dalam *Project Ten New Bali's* adalah dengan memanfaatkan pesona masing-masing pada setiap destinasi. Akan tetapi, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dipilih menjadi empat destinasi yang dijadikan super prioritas. Hal ini terjadi karena agar Indonesia dapat segera merasakan dampak dari pembangunan sektor pariwisata. Keempat destinasi super prioritas tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika.

Melalui *Strategic Direction II* yang berfokus pada pariwisata ASEAN yang berkelanjutan dan inklusif, *Project Ten New Bali's* telah menerapkan poin-poin ATSP 2016-2025 yakni:

- Melibatkan Komunitas Lokal dan Partisipasi Sektor Publik-Swasta dalam Rantai Nilai Pariwisata

Dalam hal ini masyarakat telah melakukan pengembangan desa wisata dan *homestay* di Bali Baru. Mereka dituntun oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa (Kemendes), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi. Dari sektor publik, terdapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM), dan BUMN, berupa usaha binaan dan akses pasar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan berupa infrastruktur. Adapun Kemendes memberikan bantuan berupa peningkatan SDM, sadar wisata, Sapta pesona, dll. Sedangkan dari swasta berupa kerja sama *join sponsorship*, kegiatan hibah CSR." (Axioma, 2021)

- Menjamin keselamatan, keamanan, perlindungan dan manajemen situs warisan

Dalam poin ini, pariwisata berperan untuk mempromosikan, ikut menyiapkan masyarakat sekitar agar bisa menunjang usaha pariwisata dengan memanfaatkan situs warisan yang ada, membantu dalam pengemasan rantai pasok usaha wisata di daerah wisata, dst. Bekerjasama dengan UNWTO, UNESCO dan organisasi internasional lainnya, termasuk melalui kerjasama bilateral dengan negara sahabat (Axioma, 2021). Dengan demikian, keberadaan situs warisan dapat terjaga dan dapat terus dinikmati keindahannya maupun nilai sejarahnya oleh wisatawan, begitu pula generasi masyarakat seterusnya.

Project Ten New Bali's dikembangkan dengan memperhatikan aspek lingkungan, berupa aktivitas wisata yang ramah lingkungan. Salah satunya dapat dilihat dalam pengembangan Kepulauan

Seribu dalam proyek ini. Dalam rangka meningkatkan pariwisata di Kepulauan Seribu, dibuatlah berbagai proyek konservasi alam di Kabupaten Kepulauan Seribu, hal ini supaya wisata tidak hanya meningkatkan ekonomi namun juga ekosistem lingkungan tetap lestari (Kemenlu, 2018). Dari aspek ekonomi, pariwisata juga sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Setelah adanya pengembangan *Project Ten New Bali's* pendapatan asli daerah di destinasi mengalami peningkatan yang pesat. Saat ini para sektor pariwisata lebih banyak diminati oleh para konsumen, hal ini membuat pemerintah berlomba-lomba mendorong pariwisata berkelanjutan menjadikan setiap kota mempunyai wisata unggulan masing-masing daerah yang akan menjadi daya tarik sendiri untuk wisatawan yang berkunjung.

Seluruh aspek dalam konsep *sustainable tourism* telah berhasil diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Ketiga aspek ini menjadikan sektor kepariwisataan Indonesia berkembang. Pembangunan kepariwisataan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pariwisata. salah satunya masyarakat yang merupakan unsur penting yang bersinergi dan mendukung pembangunan kepariwisataan di masing-masing daerah destinasi. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat baik sebagai subjek, pelaku maupun penerima manfaat dari pengembangan pariwisata. dukungan masyarakat yang menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan kepariwisataan.

Kesimpulan

Kebijakan pengembangan pariwisata pada *Project Ten New Bali's* merupakan respon dari pemerintah Indonesia terhadap

perubahan rezim pariwisata internasional yang berbasis prinsip *sustainable tourism*. *ATSP 2016-2025* merupakan rezim pariwisata internasional yang telah diimplementasikan oleh seluruh negara anggota kawasan Asia Tenggara untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas di kawasan Asia Tenggara. Rezim *ATSP II* ini terbentuk dari ASEAN yang merupakan organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN membutuhkan kontribusi dari masing-masing negara untuk mewujudkan cita-cita tersebut sehingga terbentuklah kesepakatan *ATSP II*. Kesepakatan strategis ini membantu negara anggota ASEAN dalam mempromosikan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata masing-masing negara agar dapat bersaing di dunia internasional. Dengan mengikuti beberapa arahan strategis pariwisata dalam *ATSP II*, negara anggota ASEAN mampu mewujudkan wisata yang berkelanjutan dan bersaing dengan pariwisata internasional.

Melalui *Strategic Direction II* yang fokus pada mewujudkan pariwisata ASEAN yang berkelanjutan dan inklusif, *Project Ten New Bali's* telah menerapkan 2 poin dari *ATSP 2016-2025* diantaranya melibatkan komunitas lokal dan partisipasi sektor publik-swasta dalam rantai nilai pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat telah melakukan pengembangan desa wisata dan *homestay* di Bali Baru. Mereka dituntun oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa (Kemendes), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi. Kedua, menjamin keselamatan, keamanan, perlindungan aset dan manajemen situs warisan. Pemerintah juga kerjasama dengan UNWTO, UNESCO dan organisasi internasional lainnya, termasuk melalui kerjasama bilateral dengan negara sahabat dalam mempromosikan pariwisata Indonesia.

Daftar Pustaka

- I Nengah Wijaya and I Nyoman Kanca. (2019). Pembangunan Pariwisata Global di Bali. *Media Bina Ilmiah*, Vol. 13, No. 10 .
- ASEAN. (2015). *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025*. Jakarta: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
- Axioma, D. (2021, February 18). Wawancara Staf Kemenkoparekraf bagian Analisis Madya. (D. Sulistyowati, Interviewer)
- Ayuningtyas, T. N. (2016, December 23). *Interkonektivitas Pariwisata di Asia Tenggara*. Retrieved October 06, 2020, from Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM: <https://pssat.ugm.ac.id/id/interkonektivitas-pariwisata-di-asia-tenggara/>
- CNN, I. (2018, October 14). *Indonesia Pamer "10 Bali Baru" di Pertemuan IMF-Bank Dunia*. Retrieved December 29, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181014151703-269-338377/indonesia-pamer-10-bali-baru-di-pertemuan-imf-bank-dunia>
- Dwi Indah Lestari and Patria Prasetio Adi. (2015). Analisis Industri Pariwisata Sebagai Keunggulan Bersaing Indonesia. *Portofolio*, Volume 12, No. 2 , 107-126.
- Hanneda, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional*. Malang: Intrans Publishing.
- Katja. (2020). *The Importance of Tourism in Any Country-Economy, Infrastructure, & Business Opportunities (With Infographic)*. Retrieved August 28, 2020, from Travel Actions: <https://traveltractions.com/importance-of-tourism-types/>
- Kemenlu. (2015, March 17). *Pembentukan Masyarakat ASEAN 2015*. Retrieved October 06, 2020, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/i/>

read/108/halaman_list_lainnya/pembentukan-masyarakat-asean-2015

- Kemenlu. (2018). *Ten Destinations as the "New Bali"*. Retrieved March 06, 2021, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/chicago/en/read/ten-destinations-as-the-new-bali/4203/etc-menu>
- Kemenparekraf. (2018). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata 2018*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kemenparekraf. (2015). *Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Keohane, R. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Komelia Johanna, e. (2020). Strategi Komunikasi Pemasaran Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas "Bali Baru" di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. *Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi, Vol. 1, Issue 6*, 632.
- Kusnandar, V. B. (2019). *Di ASEAN Kunjungan Wisatawan Mancanegara Indonesia Urutan ke-4*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/19/di-asean-kunjungan-wisatawan-mancanegara-indonesia-urutan-ke-4>
- Michael Quinn Patton and Michael Cochran. (2002). *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*. London: Research Officer MSF.
- Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida. (2017). *Pariwisata Berkelanjutan*. Denpasar: Cakra Press.

- Octarica, A. F. (2015). The Roles of The Government In Increasing The International Tourist Arrivals: The Case of Malaysia. *Thesis, Universitas Gadjah Mada* .
- Ruggie, J. G. (1982). International regimes, transactions, and change: embedded liberalism in the postwar economic order. *International Organization* 36, 2, Spring , 379-415.
- Ruslan, H. (2016, February 25). *Soal "10 Bali Baru" Ini Penjelasan Menpar*. Retrieved July 07, 2020, from Republika: <https://republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/16/02/25/o33muz372-soal-10-bali-baru-ini-penjelasan-menpar>
- Stephan Haggard and Beth A. Simmon. (1987). Theories of Intenational Regimes. *International Organizations, Vol.41, Issue 3, Summer* , 491-517.
- Sugiarto, E. C. (2019, April 09). *Pariwisata, Lokomotif Baru Penggerak Ekonomi Indonesia*. Retrieved August 28, 2020, from Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia : https://www.setneg.go.id/baca/index/pariwisata_lokomotif_baru_penggerak_ekonomi_indonesia
- Suradnya, I. M. (2006). Analisis Fakor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali. *Sekolah Tinggi Pariwisata Bali* .
- Thaib, H. S. (2019). *STRATEGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN INDONESIA*. Retrieved July 16, 2020, from Kemenkeu: https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Sosialisasi%20SBN/5.%20Creative%20and%20Innovative%20Financing%20Forum_Strategi%20dan%20Kebijakan%20Pengembangan%20Sektor%20Pariwisata.pdf

Tourism, Where to Invest. (n.d.). Retrieved December 23, 2020, from Invest in ASEAN: <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/tourism>

UNWTO. (2017). *Tourism for Sustainable Development in the Least Developed Countries, Leveraging Resources for Sustainable Tourism with the Enhanced Integrated Framework*. Geneva: World Tourism Organization (UNWTO), the International Trade Centre (ITC) and the Enhanced Integrated Framework (EIF).